

Sengketa Lahan Pertambangan

<http://news.ipb.ac.id>

Diposting oleh admin pada tanggal 24 January 2012

Maraknya konflik atau sengketa lahan yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa daerah di Indonesia, menjadi bahasan menarik Dialog Pagi RRI Selasa (3/1) di Studio 3 RRI Bogor. Hadir sebagai narasumber Kepala Pusat Kajian Resolusi Konflik dan Pemberdayaan (CARE) Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Sumardjo.

Dalam bahasannya Prof. Sumardjo menyampaikan konflik yang akhir-akhir ini terjadi rata-rata disebabkan lemahnya Peraturan Pemerintah. Selain itu, terjadinya konflik juga diakibatkan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat disekitar daerah konflik. "Masyarakat merasa punya hak untuk hidup, sedangkan perusahaan merasa berkuasa karena mempunyai izin dari pemerintah. Hal ini menyebabkan rakyat merasa tersisih tidak bisa hidup. Peran pemerintah sangatlah penting untuk meminimalisasi terjadinya konflik," kata Prof. Sumardjo. Pemerintah harus mempunyai hubungan yang baik dan juga harus dapat memediasi hubungan antara masyarakat serta perusahaan yang akan membangun pertambangan dengan masyarakat sekitar.

Dalam sesi tanya jawab dengan pendengar melalui telepon dan Short Message Service (SMS) yang bertanya mengenai sah tidaknya jual-beli tanah yang surat tanda buktinya hanya tanda tangan di atas materai saja tetapi tidak menggunakan kertas segel, Prof Sumardjo menyampaikan bahwa hal ini harus dipahami masyarakat sebagai salah satu penyebab konflik. "Akte jual beli harus menggunakan kertas segel dan menyertakan saksi-saksi yang mencantumkan tanda tangannya. Selanjutnya agar lebih kuat lagi dilanjutkan ke tahap pembuatan sertifikat hak milik yang bersangkutan. Proses seperti ini juga penting dilakukan untuk mengurangi terjadinya konflik," papar Prof. Sumardjo

Menurutnya penyelesaian utama dari kasus sengketa lahan adalah harus ada kepastian hukum dari pemerintah, kenali hak dan kewajiban masing-masing, lakukan dengan sinergis yang ada, harus adil dan harus dipahami oleh masyarakat sekitar. "Harus tahu amandemen, harus ada sosialisasi pada masyarakat, ada penyuluhan, lakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Apabila ada suara-suara miring yang memancing konflik, maka peran Kominfo dibutuhkan untuk menjadi penyeimbang," jelas Prof.Sumardjo.

Dalam penutup bahasannya Prof. Sumardjo menyampaikan, untuk mengurangi kasus-kasus seperti kejadian Mesuji dll, ada beberapa hal penting untuk disikapi pemerintah, masyarakat serta perusahaan yang akan mengelola lahan (dalam hal ini perusahaan yang akan membeli lahan sekitar), yaitu dengan melakukan penyadaran masyarakat sekitar melalui tradisi, harus bagaimana, harus diapakan dan sebagainya. Bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat sehingga tidak mudah dimanfaatkan oleh kelompok (tengkulak/oknum) yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Perusahaan dan pemerintah harus melakukan sosialisasi pendekatan contohnya melalui acara ini (Dialog RRI). "Sosialisasi dapat dilakukan juga dengan pendekatan melalui kegiatan-kegiatan lainnya di masyarakat untuk mensosialisasikan kerjasama, peraturan atau undang-undang yang telah dibuat. Jangan menunggu dulu konflik terjadi, baru masalah diselesaikan," urai Prof. Sumardjo.(NDA)

